

ABSTRAK

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEKERASAN SEKSUAL BERBASIS ELEKTRONIK

Oleh : Lintang Dewi Astuti Effendi

Dosen Pembimbing Utama : Dr. Moh. Zainuddin, S.H., S.H.I., M.Hum.

Dosen Pembimbing Pendamping : Moh. Anwar, S.H., M.M., M.H.

Salah satu kejahatan yang meningkat di Indonesia saat ini ialah kejahatan lewat media sosial. Kekerasan seksual berbasis elektronik salah satunya yang marak terjadi saat ini. Kekerasan ini difasilitasi oleh teknologi, sama halnya dengan kekerasan di dunia nyata, tindakan ini harus mempunyai niat ataupun maksud melecehkan korban kejahatan seksual.

Perumusan masalah dari skripsi ini adalah Bagaimana perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual berbasis elektronik dan Bagaimana pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku kekerasan seksual berbasis elektronik. Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini ialah untuk mengetahui dan mendapatkan solusi dari rumusan masalah tersebut.

Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini ialah normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dengan beberapa sumber bahan hukum primer dan sekunder, serta penelusuran bahan hukum melalui perundang-undangan dan literatur lainnya.

Bentuk perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual berbasis elektronik diatur dalam UUD 1945 dan UU Pornografi yang didalamnya melindungi hak asasi dari korban, rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial. Lebih lanjut lagi penegakan dan pertanggungjawaban hukum bagi pelaku kekerasan seksual berbasis elektronik secara eksplisit dapat ditemui dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan kedua dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual berbasis elektronik masih terbatas dengan penggunaan UU Pornografi dan UU ITE. Pertanggungjawaban dan penegakan hukum yang ada di Indonesia bagi pelaku kejahatan kekerasan gender berbasis online masih belum berjalan optimal di Indonesia. Pemerintah Indonesia diharapkan dapat memberikan sosialisai atau edukasi kepada masyarakat tentang Kekerasan seksual berbasis elektronik untuk menghindari dan mencegah terjadinya kasus seperti ini. Penting dilakukan rekonstruksi dan reformulasi sanksi pidana dalam hukum positif demi terwujudnya tujuan pemidanaan.

Kata kunci : Korban, Kekerasan Seksual, Elektronik.

ABSTRACT

LEGAL PROTECTION OF VICTIMS OF ELECTRONIC-BASED SEXUAL VIOLENCE

By : Lintang Dewi Astuti Effendi

Main Supervisor : Dr. Moh. Zainuddin, S.H., S.H.I., M.Hum.

Assistant Supervisor : Moh. Anwar, S.H., M.M., M.H.

One of the increasing crimes in Indonesia today is crime through social media. Electronic-based sexual violence is one of the things that is happening nowadays. This violence is facilitated by technology, as is the case with violence in the real world, this action must have the intention or intention of harassing victims of sexual crimes.

The formulation of the problem of this thesis is How is the legal protection for victims of electronic-based sexual violence and How is legal accountability for perpetrators of electronic-based sexual violence. The purpose of writing this thesis is to find out and get a solution from the formulation of the problem.

The research method in writing this thesis is normative by using a statutory approach with several sources of primary and secondary legal materials, as well as tracing legal materials through legislation and other literature.

Forms of legal protection for victims of electronic-based sexual violence are regulated in the 1945 Constitution and the Pornography Law which protect the human rights of victims, health rehabilitation, social rehabilitation. Furthermore, law enforcement and accountability for perpetrators of electronic-based sexual violence can be found explicitly in Law Number 19 of 2016, the second amendment to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions.

Legal protection for victims of electronic-based sexual violence is still limited through the use of the Pornography Law and the ITE Law. Accountability and law enforcement in Indonesia for perpetrators of online-based gender violence crimes are still not running optimally in Indonesia. It is hoped that the Indonesian government can provide socialization or education to the public about electronic-based sexual violence to avoid and prevent cases like this from happening. It is important to carry out the reconstruction and reformulation of criminal sanctions in positive law in order to realize the objectives of punishment.

Keywords: *Victims, Sexual Violence, Electronic.*